

Judul : Pesantren Kudu Bebas Dari Perilaku Kekerasan!
Tanggal : Selasa, 05 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Pesantren Kudu Bebas Dari Perilaku Kekerasan!

SEJUMLAH kalangan sepakat, pesantren harus bebas dari perilaku kekerasan. Hal ini terkait peristiwa yang menimpa BM (14), santri Pondok Pesantren Tartilul Qur'an (PPTQ) Al Haniffiyah, di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi korban dugaan penganiayaan hingga meninggal dunia.

Penjabat (Pj) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin meminta semua pihak, baik pesantren maupun orang tua, saling introspeksi pasca meninggalnya santri di Kediri. Dia berharap, peristiwa serupa tidak terulang dan menjadi bahan evaluasi bersama.

"Kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada ananda BM. Kita doakan yang terbaik untuk almarhum. Semoga ini menjadi tragedi terakhir yang terjadi di lingkungan pesantren," ujar Gus Kikin dalam siaran persnya, Minggu (3/3/2024).

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng ini menambahkan, kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi para pengurus dan pengasuh pesantren. Karenanya, pengelola ponpes harus selalu adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi di



KH Abdul Hakim Mahfudz

pendidikan berjalan semakin baik ke depan," katanya.

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta Pemerintah memperketat regulasi dan pengawasan terhadap pondok pesantren.

Dia mengingatkan, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dari akar masyarakat, memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan spiritualitas santri. "Namun, kejadian ini menunjukkan perlunya upaya pengawasan dan penjaminan kualitas pembelajaran yang aman dan kondusif," ujar Kahfi.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai,

terhadap berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Perbaikan harus terus berjalan. Namun tetap menjadikan nilai-nilai luhur pesantren sebagai inspirasi dan pedoman. Pesantren harus membimbing keseharian para santri," jelas dia.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhwah KH Cholil Nafis mengatakan, peristiwa kekerasan di pesantren harus menjadi muhasabah semua penyelenggara pendidikan. "Bullying kan sebenarnya bukan hanya pesantren. Kita waspada saja dan evaluasi diri," pesannya.

Kiai Cholil mengaku, usai mengetahui berita kasus kekerasan di pesantren yang ada di Jawa Timur itu, dia langsung memberikan arahan di ponpes yang diasuhnya.

"Saya sebagai pengasuh pesantren langsung rapat. Jangan sampai ada yang bangun tengah malam, jangan sampai lepas pengawasan," cetusnya.

Sementara, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemendagri) langsung merumuskan sejumlah langkah kuratif dan preventif agar kasus serupa tidak terulang.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono mengatakan, pihaknya akan terus mensosialisasikan tentang pesantren ramah anak dan menyusun regulasi tentang penanggulangan kekerasan di pesantren.

"Kami telah melakukan rapat koordinasi, yang diikuti juga perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kedepan,

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, pesantren bukan hanya tempat belajar agama. Pesantren merupakan ruang bagi santri, untuk tumbuh secara fisik, emosional, dan intelektual, dalam lingkungan yang aman.

Karenanya, setiap pesantren harus memiliki izin operasional sebagai jaminan, mereka mematuhi standar yang telah ditetapkan, terutama dalam hal keamanan dan perlindungan anak.

"Saya mendukung upaya Kemenag dan lembaga terkait lain untuk meningkatkan sosialisasi tentang pesantren ramah anak dan penanggulangan kekerasan. Ini harus diikuti dengan aksinya dalam bentuk regulasi yang lebih ketat dan efektif, serta pengawasan yang lebih intensif," ujar dia.

Di media sosial X, netizen juga mendesak agar pesantren bebas dari perilaku kekerasan. Akun @suvicai mendesak kasus kekerasan di pesantren diutus tuntas.

"Orang-orang tua menitipkan anak di pesantren untuk belajar, bukan untuk menjadi korban. Mesti diusut. Bullying dan sejumlah kekerasan adalah tantangan buat lembaga pendidikan anak, termasuk pesantren," tulisnya.

Akun @ahmadmasnur mengatakan, selaku orang tua dia waswas dengan terkluaknya kasus kekerasan di pesantren.

"Perlu koordinasi jejaring pondok pesantren untuk menghilangkan kasus bullying di pondok. Saya pernah merasakan perasaan cemas saat anak saya yang di pondok minta boyong karena mendapatkan perlakuan kurang mengenakkan dari sesa-

Anak Indonesia (KPAI). Kedepan, kami akan terus melakukan sosialisasi tentang pesantren ramah anak, mengingatkan kepada pesantren untuk memiliki izin operasional, dan menyusun sejumlah aturan tentang penanggulangan kekerasan di pesantren," jelasnya.

Waryono menambahkan, pihaknya terbuka untuk terus mengevaluasi, serta menerima masukan dan saran dari berbagai kalangan.

"Sampaikan evaluasi dan saran perbaikan kepada kami, agar kita dapat menjadikan dunia

kurang mengenakkan dari sesama santri," sebutnya.

Sedangkan akun @danszimmer menekankan perlunya keterbukaan dan aturan yang baru untuk mengantisipasi tindak kekerasan di pesantren.

"Kekerasan fisik dan seksual yang terjadi di pesantren karena nggak ada transparansi, komunikasi, dan kontrol yang cukup antara pihak pesantren, anak, dan orang tua. Sudah waktunya ada undang-undang atau peraturan baru, problemnya udah sistematis," cuitnya. ■ OSP